

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAS DAERAH (CASH MANAGEMENT) DALAM RANGKA Mendukung PENERIMAAN DAERAH

Ichsan Ansari Ibrahim\*, Sri Hartati\* dan Henny Nur Intan Qomala\*

\*Dosen Program Studi Kewirausahaan, ITBKPP

### ARTICLE INFO

#### Riwayat Artikel:

Diterima 28 Juli 2022

Disetujui 30 Juli 2022

#### Keywords:

Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah  
Penerimaan Daerah

### ABSTRAK

**Abstract :** *The implementation of Regional Autonomy in Indonesia until 2013 has been running for 14 years, as mandated by Law number 22 of 2009 which has been canceled by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which is complemented by Law Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between the Central Government and Regional Governments, shows that there are encouraging results where development in the regions can run and services to the community are increasing because the distance to services is getting closer, even though there are still many shortcomings. To find out whether the performance of financial management is running as desired, then to measure it using Effectiveness Analysis and to find out how much influence spending income has on idle funds (idle cash) an analysis tool is used, namely Multiple Linear Regression Analysis, using the SPSS program. Short-term investment is strongly influenced by idle cash, and idle cash has a very positive effect on income and a negative effect on spending, so it is necessary to develop an appropriate strategy so that there is no weak service to the community. From the results of the analysis it turns out that the relationship between income and idle funds has a very strong positive relationship. Analysis of spending on idle funds (idle cash) has a negative effect, meaning that if spending is suppressed it will increase idle funds (idle cash), therefore it is necessary to develop an appropriate strategy.*

**Abstrak :** Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sampai dengan tahun 2013 ini telah berjalan selama 14 Tahun, sebagaimana amanah Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menunjukkan adanya hasil yang menggembirakan dimana pembangunan di daerah dapat berjalan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat karena jarak layanan semakin dekat, sekalipun masih banyak kekurangannya. Untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai yang diinginkan, maka untuk mengukurnya menggunakan Analisa Efektifitas dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pendapatan terhadap dana menganggur (idle kas) digunakan alat Analisa yaitu Analisa Regresi Linier Berganda, dengan menggunakan program SPSS. Investasi jangka pendek sangat dipengaruhi oleh dana menganggur (idle cash), dan dana menganggur (idle cash) sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan dan berpengaruh negative oleh belanja, maka perlu disusun suatu strategi yang tepat sehingga tidak terjadi lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Dari Hasil analisa ternyata hubungan pendapatan terhadap dana menganggur mempunyai hubungan positif yang sangat kuat, Analisa belanja terhadap dana menganggur (idle cash) berpengaruh negative berarti jika belanja ditekan akan menaikkan dana menganggur (idle cash), oleh sebab itu perlu disusun suatu strategi yang tepat.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Alamat Korespondensi :**

Ichsan Ansari Ibrahim  
Program Studi Kewirausahaan,  
Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua,  
Jl. YPKP No.51, Sentani Kota  
E-Mail : [ichsanansariibrahim67@gmail.com](mailto:ichsanansariibrahim67@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sampai dengan tahun 2013 ini telah berjalan selama 14 Tahun, sebagaimana amanah Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menunjukkan adanya hasil yang menggembirakan dimana pembangunan di daerah dapat berjalan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat karena jarak layanan semakin dekat, sekalipun masih banyak kekurangannya. Rendahnya pendapatan Asli Daerah maka pemerintah masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi umum, Dana Alokasi khusus dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah, tampaknya daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam peningkatan penerimaan daerah. Ada beberapa potensi daerah yang selama ini memberikan kontribusi penerimaan sangat besar untuk daerah dan meningkatkan penerimaan daerah tetapi tidak termasuk dalam jenis penerimaan daerah yang harus dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Penetapan tarif serta adanya penambahan empat jenis pajak baru yaitu Pajak Bumi dan bangunan sector Perkotaan dan Perdesaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak Kabupaten/kota serta pajak Rokok yang merupakan Pajak Baru bagi Provinsi. Selain dari perluasan pajak terdapat juga penambahan jenis retribusi dan perluasan obyek retribusi, adapun jenis pajak baru bagi daerah yaitu Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.

**METODE**

Untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai yang diinginkan, maka untuk mengukurnya menggunakan Analisa Efektifitas dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pendapatan terhadap dana menganggur (idle kas) digunakan alat Analisa yaitu Analisa Regresi Linier Berganda, dengan menggunakan program SPSS.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Keuangan Pemerintah Daerah**

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu dari Sembilan Kabupaten yang terkemuka diseluruh Tanah Papua yang pernah menjadi dari Wilayah Ibu Kota provinsi Irian Barat, Irian Jaya dan Papua. Kabupaten Jayapura dalam mengelola Pemerintahan masih mengandalkan Anggaran dari Pemerintah Pusat, karena kontribusi Pendapatan Asli daerah masih sangat rendah. Namun pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura termasuk yang terbaik di Provinsi Papua dengan indicator Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah daerah ke Badan Pemeriksaan Keuangan yang tercepat di Provinsi Papua.

**1. Penyusunan APBD**

Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateen Jayapura yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah, yaitu:

- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikoordinir oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura.
- Penyusunan APBD dan selanjutnya disidangkan dengan DPRD serta evaluasi oleh Provinsi Papua dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura.

Semakin lambat pelaksanaan APBD makan akan berdampak kepada pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan yang tidak optimal, namun dilain sisi dengan situasi demikian dana yang berada di Kas Daerah terjadi penumpukan sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan investasi jangka pendek.

**B. Penerimaan Daerah**

Pertumbuhan penerimaan daerah di Kabupaten Jayapura sejak tahun 2007 s/d 2010 sangat rendah dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,61% dan hal ini yang sangat wajar karena kontribusi penerimaan terbesar adalah dari Dana Pertimbangan yang bersumber dari APBN bersifat dana transfer dari Pemerintah

Pusat dengan prinsip *money follows function* yaitu 90,64% atau Rp. 599.912.265.664,- / tahun. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggal potensi daerah.

#### C. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, penyusunan APBD mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.

#### D. Pembiayaan

Pertumbuhan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak menunjukkan suatu prestasi dan konsistensi yang harus dipertahankan atau ditingkatkan karena pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah kabupaten Jayapura dimaksudkan untuk menutup difisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### E. Management Kas

Management Kas dan efek atau investasi dalam marketable securities merupakan bidang yang sangat vital dalam manajemen modal kerja. Investasi dalam marketable securities merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh penghasilan atas dana-dana yang untuk sementara belum digunakan (*idle cash*). Bilamana perusahaan menyadari bahwa jumlah uang kas yang dimilikinya sudah terlalu besar, maka seringkali akan diambil sebagian dari jumlah kas tersebut untuk ditanamkan dalam surat-surat berharga yang dapat memberikan penghasilan kepada perusahaan dalam bentuk bunga.

Dalam mengelola kas dalam menjaga risiko krisis likuiditas dan juga dapat mengoptimalkan dana yang belum termanfaatkan serta mempermudah pengendalian internal, melakukan strategi mengelola kas sebagai berikut :

##### 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana disusun bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disepakati penjadwalan pencairan dana ke SKPD yang disusun Pertriwulan dan kegiatan. Dampak dari penerbitan SPD tersebut SKPD tidak dapat semauanya mencairkan dana apabila kegiatan tersebut belum dilakukan atau belum selesai kegiatannya.

##### 2. Dana Persediaan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Uang persediaan adalah uang maksimal yang boleh berada di SKPD, apabila SKPD ingin mencairkan dana berikutnya tidak dapat dilakukan apabila dana sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan apabila sudah dipertanggungjawabkan, maka dana yang cair adalah sebesar yang sudah dipertanggungjawabkan.

##### 3. Pengelolaan Kas Daerah

Kas Daerah dikelola oleh bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset. Semua dana yang masuk maupun yang keluar harus melalui kas daerah. Proses pencairan dana dari Kas Daerah baru dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik yang berupa uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) serta langsung (LS).

#### F. Pengelolaan Idle Kas

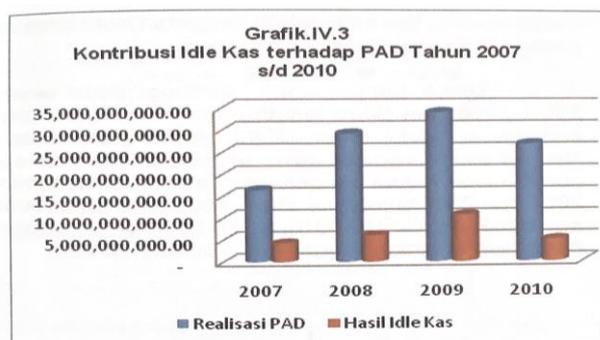
Pengelolaan dana yang menganggur di Kabupaten Jayapura baru dilakukan pada tahun 2007 dan ini dilakukan dengan penuh tantangan karena banyak pihak yang belum memahami bagaimana harus mengelola dana tersebut, dan selain itu adanya kekhawatiran akan terjadi penyimpangan atau tindakan korupsi dan pemanfaatan dana tersebut.

Pengelolaan Dana idle tidak membutuhkan dana operasional yang besar, namun menghasilkan penerimaan yang sangat besar. Sejak tahun 2007 s/d 2010 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,27% atau Rp. 6.518.019.243,- terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel.1 KONTRIBUSI IDLE KAS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007 S/D 2010

No	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	HASIL PENGELOLAAN IDLE KAS	%
1	2007	16,483,829,531.00	4,295, 164,527.00	26.06
2	2008	29,227,698,449.00	6,068,921,232.00	20.76
3	2009	33,953,846,948.00	10,695,940,953.00	31.50
4	2010	26,744,931,866.00	5,012,050,261.00	18.74

Sumber data : DP2KA



Sumber : DP2KA Kab. Jayapura

Dari tabel dan Grafik tersebut diatas terlihat bahwa kontribusi dana Idle tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan yang terendah pada tahun 2007.

#### A. Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Investasi perbulan

Pada tahun 2007 penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember, sedangkan pada tahun 2008 penerimaan tertinggi terjadi pada bulan September 2008, tahun 2009 pada bulan Desember 2009 dan pada tahun 2010 penerimaan tertinggi terjadi pada bulan November 2010. Sedangkan penerimaan pembiayaan penerimaan tertinggi untuk empat tahun terakhir dari tahun 2007 s/d 2010 terjadi pada bulan Januari, hal ini wajar saja karena otomatis uang kas tutup tahun anggaran akan tercatat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Untuk pengeluaran tertinggi pada tahun 2007, 2008 dan 2009 terjadi pada bulan Desember sedangkan pada tahun 2010 terjadi pada bulan November, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terjadi pengeluaran tertinggi pada tahun 2007 dan 2008 bulan Mei, tahun 2009 pada bulan Juni sedangkan pada tahun 2010 pengeluaran pembiayaan tertinggi terjadi pada bulan Februari.

#### B. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar

Laporan arus kas (cash flow statement) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi arus kas sangat penting bagi pengambil keputusan dalam menjaga likuiditas keuangan, apabila terjadi deficit maka management harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, sedangkan apabila terjadi penumpukan dana/dana menganggur (idle kas) maka perlu melakukan peningkatan nilai tambah melalui investasi.

##### 1. Efektifitas Pendapatan dan Belanja

Hasil perhitungan ditampilkan pada dibawah ini :

Tabel .2 Target Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Jayapura Tahun 2007 S/D 2010

Thn	PENDAPATAN			BELANJA		
	TARGET	REALISASI	EFEK	TARGET	REALISASI	EFEK
2007	640,452,258,-	680,517,175,-	106	701,544,799,-	665,823,051,-	94.91
2008	676,247,557,-	703,366,755,-	104	748,298,284,-	682,777,664,-	91.24
2009	614,199,065,-	647,101,101,-	105	717,801,093,-	693,490,619,-	96.61
2010	645,913,627,-	667,033,457,-	103	686,129,058,-	648,847,427,-	94.57

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya pencapaian target penerimaan dari tahun 2007 s/d 2010 rata-rata diatas 100% dengan demikian kinerja keuangan Kabupaten Jayapura di bidang Pendapatan sangat efektif, sedangkan kinerja keuangan bidang belanja diatas 90% dengan demikian kinerja keuangan masuk dalam kriteria efektif.

##### 2. Analisa Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Menganggur (idle kas)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja dan pendapatan terhadap dana menganggur (idle kas) digunakan alat Analisa yaitu Analisa Regresi linier berganda, dengan menggunakan program SPSS didapatkan sebagai berikut :

Dependent Variable: LOG(IDLE)				
Method: Least Squares2				
Sample(adjusted): 2007:02 2010:12				
Included observations: 47 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
intercept	0.6791	2.3050	0.2946	0.7697
LOG(PEND)	0.2470	0.0420	5.8797	0.0000
LOG(BLNJ)	-0.3663	0.0374	-9.8035	0.0000
LOG(IDLE(-1))	1.0870	0.0864	12.5867	0.0000
R-squared	0.8021	Mean dependent var	25.6540	
Adjusted R-squared	0.7883	S.D. dependent var	0.3036	
S.E. of regression	0.1397	Akaike info criterion	-1.0179	
Sum squared resid	0.8387	Schwarz criterion	-0.8605	
Log likelihood	27.9212	F-statistic	58.1107	
Durbin-Watson stat	2.0504	Prob(F-statistic)	0.0000	

Dari tabel diatas menunjukkan angka R squared adalah 0.8021, hal ini berarti 80,21% dari dana menganggur (idle cash) dipengaruhi oleh belanja dan pendapatan sedangkan sisanya (100% - 80,21% = 19,79%) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Dari tabel diatas, didapat F hitung adalah 58.1107 dengan tingkat signifikan 0,0000. Karena probabilitas (0.0000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi berganda bisa dipakai untuk memprediksi dana menganggur (idle cash). Rata-rata dana menganggur (idle cash) adalah Rp. 25.6540 milyar.

Koefisien regresi sebesar 0,2470 menunjukkan besarnya pengaruh positif pendapatan daerah, dimana jika pendapatan daerah naik 1% maka dana menganggur (idle cash) diperkirakan naik sebesar 0,2470 %, sebaliknya jika pendapatan daerah turun 1 % maka dana menganggur (idle cash) akan turun sebesar 0,2470 %.

Koefisien regresi sebesar -0,3663 menunjukkan besarnya pengaruh negative belanja daerah terhadap dana menganggur (idle cash) dimana jika belanja daerah naik 1 % maka dana menganggur (idle cash) diperkirakan turun sebesar 0,3663 %, sebaliknya jika belanja daerah turun 1 % maka dana menganggur (idle cash) akan naik sebesar 0,3663 %.

3. Analisa Pengaruh dana menganggur terhadap Investasi Jangka Pendek

Seberapa besar pengaruh dana menganggur terhadap investasi jangka pendek maka digunakan alat analisa regresi sederhana karena variabelnya hanya satu dengan mempergunakan program SPSS dihasilkan informasi sebagai berikut :

Dependent Variable: LOG(INJKP)				
Method: Least Squares				
Sample(adjusted): 2007:02 2010:12				
Included observations: 43				
Excluded observations: 4 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
intercept	-1.4835	4.1773	-0.3551	0.7243
LOG(IDLE)	0.5993	0.1721	3.4826	0.0012
LOG(INJKP(-1))	0.4478	0.1382	3.2400	0.0024
R-squared	0.5126	Mean dependent var	25.2149	
Adjusted R-squared	0.4882	S.D. dependent var	0.3935	
S.E. of regression	0.2815	Akaike info criterion	0.3702	
Sum squared resid	3.1707	Schwarz criterion	0.4930	
Log likelihood	-4.9585	F-statistic	21.0314	
Durbin-Watson stat	1.3258	Prob(F-statistic)	0.0000	

Dari tabel diatas menunjukkan angka R Squared adalah 0,5126. Hali ini berarti 51,26 % dari investasi jangka pendek dipengaruhi oleh dana menganggur (idle cash) sedangkan sisanya (100% - 51,26% = 48,74%) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Dari tabel diatas, didapat F hitung 21.0314 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Karena Prpbabilitas (0,0000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi berganda bisa dipakai untuk memprediksi investasi jangka pendek. Rata-rata investasi jangka pendek adalah Rp.25.2149 milyar.

Koefisien regresi sebesar 0,5993 menunjukkan besarnya pengaruh positif dana menganggur (idle cash), dimana jika dana menganggur (idle cash) naik 1% maka investasi jangka pendek

diperkirakan naik sebesar 0,5993 %, sebaliknya jika dana menganggur (idle cash) turun 1% maka investasi jangka pendek diperkirakan akan turun sebesar 0,5993%.

Besarnya pengaruh belanja dan pendapatan daerah terhadap investasi jangka pendek dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa:

Koefisien	Nilai
a0	0.6791
a1	0.2470
a2	-0.3663
A3	1.0870
b0	-1.4835
b1	0.5993
b2	0.4478

Dengan demikian besarnya pengaruh pendapatan dan belanja daerah masing-masing terhadap investasi jangka pendek dapat dihitung berdasarkan persamaan [4] dan [5] sebagai berikut:

$$1. \text{ Pengaruh pendapatan : } C1b1a1 = 0.5993 \times 0.2470 \\ = 0.1480$$

$$2. \text{ Pengaruh belanja : } C2b1a2 = 0.5993 \times -0.3663 \\ = -0.2195$$

Nilai 0.1480 menunjukkan besarnya pengaruh positif pendapatan daerah, dimana jika pendapatan daerah naik 1% maka investasi jangka pendek diperkirakan akan naik sebesar 0.1480%, sebaliknya jika pendapatan daerah turun 1% maka investasi jangka pendek akan turun sebesar 0,1480%.

Nilai -0.2195 menunjukkan besarnya pengaruh negatif belanja daerah terhadap investasi jangka pendek dimana jika belanja daerah naik 1% maka investasi jangka pendek diperkirakan turun sebanyak 0.2195%, sebaliknya jika belanja daerah turun 1% maka investasi jangka pendek akan naik sebesar 0.2195%.

Menggunakan persamaan [6] dapat dibangun model proyeksi investasi jangka pendek pemerintah berdasarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:  $INJP-1.0766+ 0.1480 \text{ PEND,*} 0.2195 \text{ BLNJ,*} + 0.6515 \text{ IDLE}+ 0.4478 \text{ INJP},,*$

## SIMPULAN

Investasi jangka pendek sangat dipengaruhi oleh dana menganggur (idle cash), dan dana menganggur (idle cash) sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan dan berpengaruh negative oleh belanja, maka perlu disusun suatu strategi yang tepat sehingga tidak terjadi lemahnya pelayanan kepada masyarakat.

1. Dari Hasil analisa ternyata hubungan pendapatan terhadap dana menganggur mempunyai hubungan positif yang sangat kuat, dengan telah diketahuinya hal tersebut maka langkah-langkah strategi pendapatan harus segera dilakukan yaitu: a) Mengintensifkan Pendapatan Daerah. b) Mengupayakan percepatan dana transfer dari pemerintah pusat dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.126/PMK.07/2010 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. c) Dana Alokasi Khusus (DAK). d) Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Penyesuaian. e) Mengoptimalkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) dalam pengembalian uang daerah.
2. Analisa belanja terhadap dana menganggur (idle cash) berpengaruh negative berarti jika belanja ditekan akan menaikkan dana menganggur (idle cash), oleh sebab itu perlu disusun suatu strategi yang tepat, yaitu: a) Menjadwalkan penyerapan dana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempertimbangkan uang masuk dan penjadwalan kegiatan secara rinci. b) Menetapkan uang persediaan disetiap SKPD. c) Pertanggungjawaban dari setiap SKPD sebagai dasar pencairan dana berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymans Manurung, 2006, Ke Mana Investasi, Kompas, Jakarta.  
 Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.  
 Building Institutions for Good Governance (BIGG), 2002, Administrasi Pendapatan Bagian 2, The Bigg Picture Edisi 16, Jakarta.

- Deibi Candra Datunsolang, 2010, Analisis Arus Kas dalam Manajemen Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Gorontalo, Tesis (unpublished), Magister Ekonomi Pembangunan, UGM, Yogyakarta.
- Fisiharto, 2005, Analisis Manajemen Kas Dalam Mengelola Idle Cash pada PT. Surya Citra Televisi, Tesis (unpublished), Studi Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Garbutt, Douglas, 1994, Manajemen Kas, Pustaka Binaan Presindo, Jakarta.
- Harry Supangkat, 2005, Buku Panduan Direktur Keuangan Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanafi, Mamduh, 2004, Manajemen Keuangan, Edisi 2004/2005, BPFE, Yogyakarta.